PENGARUH KOMPETENSI STAF AKUNTANSI, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi pada SKPD Kota Bukittinggi)

Oleh :
Putra Mhd Nazrin
Pembimbing : M.Rasuli dan Devi Safitri

Faculty of Economics Riau University,Pekanbaru, Indonesia
Email : putramhdnazrin@gmail.com

Competency of Accounting Staff, Application of Financial Accounting System of Local Government and Financial Managementonthe Quality of Government Finance Report
(Study in SKPD Bukittinggi)

ABSTRACT

This research was conducted on employees SKPD Bukittinggi City. This research was included in the quantitative research. The type of data used in this research is the primary data by source. And then, in data collections sampling was conducted with a purposive sampling method (Sugiyono,2012: 392) with respondents as many as 87 employees who working in SKPD Bukittinggi City. Data were analyzed using multiple regression with SPSS version 20. This research aimed to know the influence of the Competency Of Accounting Staff, Application Of Financial Accounting System Of Local And Financial Management On The Quality Of Government Finance Report. The main problem that researcher descriptions are as follows: to see how many significant relationship between the dependent variable to the independent variable. The results of this research showed that Competency Of Accounting Staff have influence to the Quality Of Government Finance Report, Application Of Financial Accounting System have influence to the intention to carry out an Quality Of Government Finance Report, and Financial Management have influence to the intention to the Quality Of Government Finance Report. So that all the hypotheses presented in this research received.

Keywords : Quality Of Government Finance Report, Competency Of Accounting Staff, Application Of Financial Accounting System, Financial Management.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good governance), Pemerintah Daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis menca-

kup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan pemahaman atas akuntansi keuangan daerah.

Laporan keuangan yang dalam hal ini adalah bentuk dari keadaan operasioal suatu organisasi perlu diberikan pandangan yang serius, karena tidak sedikit pihak yang sangat membutuhkan informasi mengenai Laporan keuangan, oleh sebab itu sebagai penyusun laporan keuangan memiliki tanggungjawab yang besar dalam melakukan penyusunannya.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014, yang kemudian diperbaharui dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No 02 Tahun2014, upaya konkrit untuk mewujudkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor (Erlina dan Rasdiato, 2013:21). Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakaian dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan priode-priode sebelumnya.

Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelapor dan membantu ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Sihombing, 2011:4).

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi standar akuntansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual, yang kemudian diperbaharui dengan keluarnya Permendagri No 64 Tahun 2013 yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Berbasis Akrual.

Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah (PP 71 tahun 2010) antara lain masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pimjaman dan pemerintah. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik : Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010).

1) Relevan, memiliki unsur-unsur : a) Manfaat umpan balik (*feedback value*) b) Manfaat prediktif (*redictive value*) c) Tepat waktu (*timeliness*) d) Lengkap.
2) Andal, memiliki karakteristik berikut : a) Penyajian jujur b)

Dapat diverifikasi (*verifiability*) c) Netralitas.

3) Dapat dibandingkan.
4) Dapat dipahami.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sampai pada saat ini masih banyak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia yang belum mendapatkan opini audit WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Begitu juga dengan Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi, saat ini opini audit dari BPK untuk Pemerintah Kota Bukittinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelas. Berdasarkan temuan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bukittinggi dari tahun 2009-2012 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan pada tahun 2013-2014 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelas.

Berdasarkan hasil laporan pemeriksaan BPK RI untuk audit laporan keuangan pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2009 sampai 2012 yang meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sedangkan pada tahun 2013-2014 opini BPK menyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi dengan paragraf penjelas.

Disamping itu ada beberapa hal yang menjadi perhatian lebih yaitu, permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain : 1) Terdapat kelebihan pembayaran honorarium PNS dan non-PNS Rp 55.615.000 sebesar Rp 18.025.000 tanpa satuan biaya yang wajar, sebesar Rp 183.420.000 tidak didukung bukti lengkap, serta memboroskan Keuangan Daerah sebesar Rp 448.480.000. 2) Kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD sebesar Rp 157.836.000 3) Pemerintah Kota Bukittinggi belum menerima pengembalian sisa uang muka atas pekerjaan perencanaan pembuatan legerjalan sebesar Rp 122.536.062. *(http://bukittinggi.bpk.go.id)*.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Sehingga perlunya pembenahan terhadap sistem kerja pada pegawai pemerintah daerah terutama bagian penata-usahaan keuangan agar Kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan bermanfaat serta bernilai informasi yang akurat. Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keungan pemerintah daerah. Namum disini peneliti hanya akan meneliti tentang Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi, Penerapan Sistem Akun-tansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Apakah Kompetensi Staf Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? 2) Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? 3) Apakah Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini adalah untuk mengetahui : 1) Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bukittinggi. 2) Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bukittinggi. 3) Pengaruh Pengelolaan Keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bukittinggi.

TELAAH PUSTAKA

Kompetensi Staf Akuntansi

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 7 tahun 2013 menyatakan bahwa Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan

Menurut Peraturan menteri dalam negeri No. 21tahun 2011, Sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengihktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian

Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan.

Seperti yang kita ketahui, proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didikung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut (Ni Luh Nyoman,dkk,2014). Dari uraian diatas hipotesis yang dilakukan adalah :

H_1 : Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntasni Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan negara mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah: Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APDB yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkalitas diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. Mardiasmo (2009:35). Dari uraian diatas hi-potesis yang dilakukan adalah :

H_2 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata-usahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia yakni, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari uraian diatas hipotesis yang dilakukan adalah :

H_3 : Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Model Penelitian

Gambar1
Model Penelitian

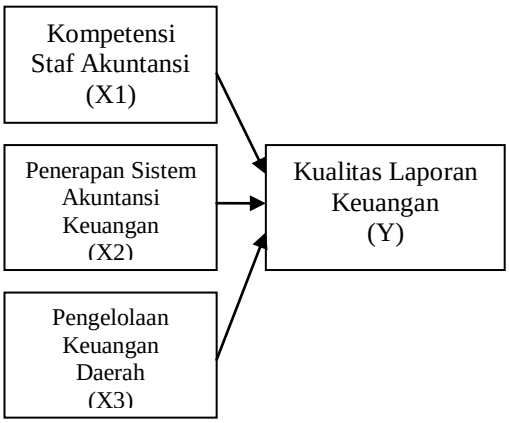

Sumber : Data Olahan, 2016

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diKota Bukittinggi yang berjumlah 29 SKPD. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sam-pel yaitu menggunakan meto de *purposive sampling. Purposive sampling* digunakan karena informasi yang diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2007:123).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer

yaitu informasi yang diperoleh langsung dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi melalui penyebaran pertanyaan dalam bentuk kuisioner pada seluruh SKPD Kota Bukittinggi.

Metode penelitian yang digunakan yaitu : 1) Penelitian Lapangan**,** Yaitu pengumpulan data primer dengan cara memberikan surat yang berisikan pertanyaan kepada instansi terkait dengan meninjau secara langsung. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, yang akan diberikan kepada responden yaitu pegawai yang bekerja pada SKPD Pemerintah Kota Bukittinggi Bagian Keuangan, Staf Bagian Keuangan Dan Bendahara Penge-luaran/Penerimaan. 2) Penelitian Kepustakaan, Penelitian ini sangat berguna untuk mendukung landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Data-data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, pencarian di internet dan instansi terkait serta referensi lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah ukuran–ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP 71 tahun 2010). Pengukuran Variabel ini diukur dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Variabel kualitas laporan keuangan ini diukur dengan instrumen pertanyaan penelitian Soimah (2014).

Kompetensi Staf Akuntansi (X1)

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 7 tahun 2013 menyatakan bahwa Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. Menurut Direktotar Pembinaan Kursus dan Pelatihan (2011) tentang standar kompetensi lulusan akuntansi menyebutkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan bersikap, berfikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari nilai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. Variabel ini diukur dengan indikator (1) Pengetahuan, (2) Keterampilan/keahlian, (3) Sikap (Erniati, 2015).

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan (X2)

Dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah digunakan kebijakan akuntansi agar dapat mengatur perlakuan akuntansi. Dengan adanya perlakuan akuntansi tersebut maka akan dapat menjamin konsistensi penyajian keuangan daerah yang dihasilkan. Kebijakan akuntansi yang dilakukan tersebut harus mengikuti standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku (Permendagri No. 21 tahun 2011). Pemahaman terhadap sistem akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan karakterstik kualitatif laporan keuangan dan tidak mengandung salah saji material. Jadi dengan

diterapkannya keuangan daerah maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Variabel ini diukur dengan indikator (1) Kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang digunakan sudah memenuhi standar akuntansi pemerintahan, (2) Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya, (3) Pembuatan Laporan Keuangan dan dilaporkan secara periodik (Pemardi, 2013).

Pengelolaan Keuangan Daerah (X3)

Dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia yakni, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Variabel ini diukur dengan indikator (1) Perencanaan Keuangan Daerah, (2) Pelaksaan Keuangan daerah, (3) Pelaporan Keuangan Daerah, (4) Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, (5) Pengawasan Keuangan daerah (Zalni, 2013)

Metode Analisis Data

Metode Regresi Linear berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara *linear* antara dua atau lebih variabel independen (X_1,X_2,…Xn) dengan variabel dependen (Y). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya. Untuk menguji hipotesi dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS. Model regresi linier berganda adalah model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Model regresi linier berganda dilakukan model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi.

Persamaan regresi linier berganda yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :
Y= Kualitas Lapotan Keuangan. X_1= Kompetensi Staf Akuntansi. X_2= Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan. X_3= Pengelolaan Keuangan Daerah. A= Konstansa. $\beta_{1,2,3}$= Koefisien. Regrese= Error

Uji Kualitas Data
Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau keahlian suatu instrument, sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurnya (Sugiyono, 2012). Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan rumus *Product Momen Pearson* dengan bantuan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS)

versi 20.Pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf signifikasi 0,05.

Uji Reabilitas

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Uji reliabilitas dilakukan dengan metode *internal consistency*. Kriteria yang digunakan dalam uji ini adalah *OneShot,* artinya satu kali pengukuran saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lainnya atau dengan kata lain mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. *Statistical Product and ServiceSolution* (SPSS) memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α) Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa intrumen penelitian tersebut handal atau reliable**.**

Uji Asumsi Klasik

Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresiberganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Uji terdiri dari ujinormalitas, uji multikolinieritas dan uji heteros-kedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antaravariabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Padamodel regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antaravariabel independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 carayaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai *Tolerance*. Jika VIF > 10 dan nilai *Tolerance* < 0,10 maka terjadi gejala Multikolinieritas (Ghozali, 2013:106).

Uji Heteroskedastitas

Uji heteroskedastisitas bertuju-an untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamataan ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut homos-kedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, tidak heterokedasitas. Heterokedasitas ditandai dengan adanya pola tertentu pada grafik *scatterplot.* Jika titik-titik yangada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka terjadi heteroskedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara antara 0 (no) dan 1 (satu). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen mem-berikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t) dan Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan pengujian hipotesis secara parsial digunakan Uji t. Uji t bertujuan untuk

mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, dan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki hubungan signifikan/tidak dengan variabel terikat secara individual untuk setiap variabel. Penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS versi 20.00.

Dasar pengambilan keputusan pengujian adalah : 1) jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak ada pengaruh yang signifikan), atau apabila tingkat sig > a 0,05 maka secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 2) jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (ada pengaruh yang signifikan), T tabel dilihat dengan derajat bebas = n – k-1, atau apabila tingkat sig < a 0,05 maka secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik data Penelitian

Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan secara langsung kepada pegawai yang bekerja di satuan kerja perangkat daerah Kota Bukittinggi. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh, yaitu teknik penetuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Kriteria anggota populasi yang menjadi sampel yaitu Kepala Bagian Keuangan, Staf Bagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan selaku kuasa pengelolaan anggaran pada 29 SKPD di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

Hasil survei kuesioner yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan dari 87 kuesioner yang disebarkan kepada 87 respoden, didapat sebanyak 87 kuesioner yang memenuhi karakteristik data penelitian. Sehingga disimpulkan bahwa kuisioner yang dibagikan ke masing-masing SKPD telah kembali (100%).

Demografi Responden

Responden dalam penelitian ini didominasi oleh pegawai kaum perempuan, yaitu sebanyak 57 responden (65,5%), dan sisanya pegawai laki-laki sebanyak 30 responden (34,5%).

Dilihat dari karakteristik usia, responden dalam penelitian ini didominasi oleh pegawai yang berusia diantara >50 tahun, yaitu sebanyak 32 pegawai (36,8%), kemudian diikuti oleh responden yang berusia 31-41 tahun sebanyak 22 pegawai (25,2%),responden yang berusia diantara 41-50 tahun sebanyak 20 pegawai (23%), dan yang paling sedikit dijadikan responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang berusia 20-30 tahun, yaitu sebanyak 13 pegawai (15%).

Dilihat dari karkteristik pendidikan, responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan tingkat pendidikan strata satu (S1), yaitu sebanyak 51 pegawai (58,6%), kemudian diikuti oleh responden dengan latar belakang pendidikan strata dua (S2) sebanyak 20 pegawai (23%), dan yang paling sedikit adalah diploma (D3), yaitu sebanyak 16 pegawai (18,4%).

Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu Kompetensi Staf Akuntansi, Penerapan Sistem akuntansi Keuangan, Pengelolaan Keuangan Daerahdan Kualitas Laporan Keuangan disajikan dalam tabel *descriptive statistics* yang menunjukkan angka minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	*Minimum*	*Maximum*	*Mean*	*Std. Deviation*
Kompetensi Staf Akuntansi (X1)	87	7.00	20.00	12.8506	3.39126
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan (X2)	87	10.00	25.00	17.0690	4.11970
Pengelolaan Keuangan Daerah (X3)	87	15.00	36.00	25.2529	4.57551
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	87	9.00	22.00	15.7471	3.56735
Valid N (listwise)	87				

Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa untuk responden Kompetensi Staf Akuntansi nilai rata-rata (*mean*) sebesar 12.8506 dengan standar deviasi sebesar3.39126.Sedangkan nilai rata-rata jawaban untuk penerapan Sistem Akuntansi Keuangan adalah sebesar 17.0690 standar deviasi sebesar 4.11970. Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 25.2529 dengan standar deviasi sebesar 4.57551. Variabel Kualitas Laporan Keuangan sebesar 15.7471 dengan standar deviasi sebesar 3.56735. Dilihat dari standard deviasi masing-masing variabel maka variabel pengelolaan keuangan daerah yang memiliki standard deviasi tertinggi di bandingkan dengan variabel lainnya.

Pengujian Kualitas Data
Hasil uji Validitas data

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Dimana keseluruhan variabel penelitian terdiri dari 34 pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = n – 2 dengan alpha 0,05, n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2013:53). Dalam penelitian ini df = n-2 (81-2) = 79, sehingga didapat r tabel untuk df (79) = 0,219.

Hasil Uji reabilitas Data

Variabel ini dikatakan valid jika cronbach alpha-nya memiliki nilai lebih besar dari 0,6 dan nilai Cronbach Alphaminimal 0,5. Hasil uji reabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Hasi Uji Realibilitas Data

NO	Instrument Variabel Penelitian	Nilai Cronbach's Alpha
1	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,814
2	Kompetensi Staf Akuntansi (X1)	0,810
3	Penerapan SistemAkuntansi Keuangan(X2)	0,851
4	Pengelolaan Keuangan Daerah (X3)	0,829

Sumber : Data Olahan, 2016

Hasil Analisis Data
Hasil Uji Asumsi Klasik
Hasil Uji Normalitas Data

Untuk mengolah data digunakan Uji Normalitas, yang menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dengan menggunakan normal *P-P Plot* data yang ditunjukkan menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas (Santoso, 2004:34). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar bawah ini.

Gambar 1
Hasil Uji
Normalitas

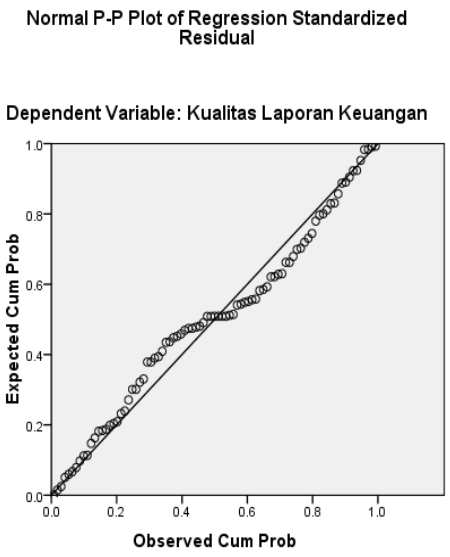

Sumber : Data Olahan, 2016

Hasil Uji Multikolonearitas

Suatu variabel dikatakan terbebas dari penyimpangan multikolinieritas, apabila nilai tolerance diantara 0.1-1.0, dan nilai VIF diantara 1.0-10. Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel berikut ini.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas Data

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kompetensi Staf Akuntansi	.745	1.342
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan	.470	2.129
Pengelolaan Keuangan Daerah	.536	1.866

Sumber : Data Olahan, 2016

Hasil Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada pola *scatterplot* antar SPRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized.* Dasar pengambilan keputusannya jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka diindikasikan telah terjadi Uji Heteroskedastisitas.

Gambar 2
Hasil UjiHeteroskedastisitas

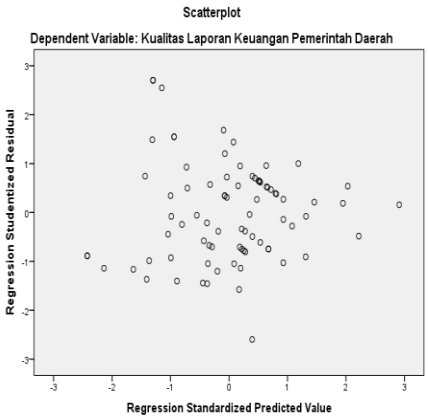

Sumber : Data Olahan, 2016

Hasil analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (*Multiple Regression Analysis*). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Sesuai dengan permasalahan, tujuan, kerangka konsep dan hipotesis dalam penelitian ini, selanjutnya dikembangkan model analisis berikut ini :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan keuangan
X_1 = Pemahaman Akuntansi
X_2 = Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan
X_3 = Pengelolaan Keuangan Daerah
A = Konstansa
$\beta_{1,2,3}$ = Koefisien Regresi
e = Error

Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Kompetensi Staf Auntansi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu 3,394 > 1,988 dan sig.t 0,001 < 0,05 dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Udiyanti, Dkk (2014) yang menyatakan bahwa Kompetensi Staf Akuntansi merupakan suatu hal yang penting dalam pemerintah untuk mencapai tujuan laporan keuangan pemerintah telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif dan efisien.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah

Hasil pengujian dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2,261 > 1,988 dan sig.t 0,026 < 0,05 dengan demikian H0ditolak dan H1 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalandengan penelitian Megawati, Dkk (2015) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 3,106 > 1,988 dan sig.t 0,003 < 0,05 dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelian dari dari Dewi, Dkk (2014) tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.720[a]	.518	.500	2.52159

Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,518. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 51,8%. Sedangkan sisanya 48,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pengaruh kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan, pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1) Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa variabel kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Bukittinggi. Hal ini dikarenakan perlunya staf yang berkompeten dalam pemahaman akuntansi untuk mencipkan laporan keuangan yang akurat dan bisa menggambarkan kondisi keuangan pada suatu instansi pemerintahan.
2) Pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa variabel, penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan di Kota Bukittinggi. Hal ini dapat dilihat dari jelasnya prosedur mulaidari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer yang dilakukan untuk dapat menghasilkan dan memudah kanpenyusunan laporan keuangan oleh instansi terkait.
3) Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa variabel pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan di Kota Bukittinggi. Hal ini dikarenakan telah terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik.

Keterbatasan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah diseluruh SKPD di Kota Bukittinggi yang meliputi: kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah. Banyak variabel lain yang juga mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah yang belum diungkap dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Maka peneliti memberikan saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya. Hal ini dikarenakan penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) variabel independen, yaitu kompetensi staf

akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah.

Oleh karena itu diharapkan pada penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama agar dapat menambahkan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah, seperti diantaranya dukungan pemimpin, peran internal audit, sistem pengendalian intern dan lain sebagainya. Serta diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk memperbesar cakupan sampel yang diambil.

DAFTAR PUSTAKA

Chabib Dan Rohcmansyah. 2010. *Akuntansi sector publik*. Jakarta: Erlangga

Desiana, 2013. Pengaruh Dukungan Pimpinan dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Informasi Keuangan Daerah. Jurnal akuntansi. Universitaas Siliwangi 2013

Direktorat Pembinaan Kursus Dan Pelatihan Tahun 2011 Tentang Standar Lulusan Akuntansi

Erlina dan Rasdiato, 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Brama Ardian. Medan

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 21*.Universitas Diponegoro, Semarang

Hadi, Ryan Crisna. 2016. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta

Halim, Abdul., 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi Sektor Publik.* Edisi 3. Penerbit Salemba Empat.

Ihsanti, Emilda. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). Jurnal Akuntansi (Vol 2. No 2. Tahun 2014).

Mahaputra, I Putu Upabayu Rama, I Wayan Putra. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Kuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi. Universitas Pajajaran. Bandung.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarata: Andi

Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011
Tentang *Pendoman Penyusunan Keuangan Daerah*

----------, Peraturan menteri dalam negeri No. 21 tahun 2011 perubahan kedua dari permendagri nomor 13 tahun 2006 Tentang *Pendoman Penyusunan Keuangan Daerah*

----------, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*

----------, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 7 tahun 2013 Tentang *Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Pegawai.*

Permadi. Angga Dwi, 2013. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Skripsi Universitas Widyatama. Bandung.

Santoso. 2004. *Metode Penelitian*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.

Sihombing, Binsar. 2011. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualiatas Laporan Keungan Daerah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.

Soemarso, S. R. 2009. Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat

Sekaran, Uma. 2007. *Research Methods For Business* Metedologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba empat

Soimah, Siti. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Skripsi Universitas Bengkulu. Bengkulu.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alphabeta

Udiyanti, Ni Luh Nyoman Ari, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan. 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol. 2 No 1 Tahun 2014).

Zalni. 2013. Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

hhtp//bukittinggi.bpk.id

www.bpk.go.id